

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya , seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH

Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember //44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

Wilayah Provinsi Riau, dihuni oleh berbagai etnik dan suku yang tersebar disetiap kabupaten/kota, dalam tatanan sosial yang fluralistik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun nilai keragaman budaya Melayu yang menjadi ciri khas dari Provinsi Riau. Hal tersebut terlihat dari filosofi yang dikemukakan oleh Laksamana Hang Tuah yakni "Tuah sakti hambah negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, tak melayu hilang dibumi."

4.1.2. Visi dan Misi Provinsi Riau

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni:

"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020"

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua

oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019, yaitu:

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, perlu adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai secara optimal. Sehingga dengan adanya pertimbangan terhadap tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 sebagai berikut.

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur;

2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik;
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa;
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

4.1.3. Letak Geografis, Iklim dan Penduduk

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" sampai 105°05'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah $\pm 8.915.016$ Ha. Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang diantaranya terdapat 4 sungai yang berperan penting sebagai prasarana perhubungan dengan kedalaman antara 6 meter sampai 12 meter, yaitu:

1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 – 12 m,
2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m,
3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m
4. dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m. Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $35,1^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $21,8^{\circ}\text{C}$. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam *klasifikasi tidak mudah hingga sangat mudah terbakar* dengan Indeks potensi membaranya api berkisar 0 – 330 (rendah – tinggi). Oleh karena itu, wilayah provinsi Riau pada tiap tahunnya selalu ditemukan banyak titik api yang berdampak pada terjadinya bencana kabut asap di sebagian/seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas curah hujan berkisar 1700 mm - 4000 mm/Tahun.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Riau tercatat sebanyak 5.877.887 jiwa. Jumlah ini terhitung paling tinggi dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penduduk Provinsi Riau mengalami peningkatan hingga 5.877.887 jiwa dari 5.867.358 jiwa pada tahun 2015. Dibandingkan tahun 2014, jumlah penduduk Riau juga meningkat sebanyak 45.999 jiwa.

Berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase jumlah penduduk tertinggi yaitu berada di Kota Pekanbaru, sebesar 15 persen dari seluruh penduduk Provinsi Riau; diikuti oleh Kabupaten Kampar sebesar 12 persen dan Rokan Hulu sebesar 11 persen. Sementara persentase jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 3 persen dari seluruh Penduduk Provinsi Riau.

4.1.4. Pemerintahan

Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, yang didalamnya terdiri dari 166 Kecamatan dan 1.846 Desa/Kelurahan.

Pembentukan organisasi atau kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian berhasil ditetapkan PERDA Provinsi Riau, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

- 2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.
- 3) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat.

a. Sekretariat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 4) Asisten Administrasi Umum;
- 5) Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
- 6) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Biro Administrasi Kemasyarakatan;
- 8) Biro Administrasi Pembangunan;
- 9) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 10) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Biro Organisasi;
- 12) Biro Umum;
- 13) Biro Hubungan Masyarakat;
- 14) Bagian-Bagian;
- 15) Subbagian-Subbagian.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda memiliki 7 unit kerja yang terdiri dari 1 sekretariat dan 6 bidang, sebagai berikut:

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang Sosial Budaya;
- 3) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- 4) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- 5) Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- 6) Bidang Sumber Daya Aparatur;
- 7) Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi.

c. Inspektorat Provinsi

Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- 1) Inspektur
- 2) Sekretariat
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Jabatan fungsional

d. SKPD Provinsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setingkat Dinas sebanyak

18 Dinas terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ;
- 7) Dinas Bina Marga;
- 8) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- 9) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 10) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 11) Dinas Pendapatan;
- 12) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 14) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 15) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 16) Dinas Kehutanan;
- 17) Dinas Perkebunan;
- 18) Dinas Perikanan dan Kelautan.

SKPD hasil Pecahan :

- 1) Dinas Bina Marga (Pecahan Dinas PU)
- 2) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumberdaya Air (Pecahan Dinas PU)

- 3) Dinas Kehutanan
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Gabungan)
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Pendapatan Daerah
- 7) Dinas Sosial
- 8) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
- 9) Dinas Perhubungan
- 10) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 11) Dinas Perikanan dan Kelautan
- 12) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 13) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 16) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 17) Dinas Pertanian dan Peternakan
- 18) Dinas Perkebunan

Lembaga Teknik Daerah Provinsi Riau sebanyak 22 lembaga, terdiri dari :

- 1) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Badan Lingkungan Hidup;
- 4) Badan Ketahanan Pangan;
- 5) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
- 6) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- 8) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 9) Berencana;
- 10) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 11) Badan Penghubung;
- 12) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 14) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 15) Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- 16) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan;
- 17) Sekretariat Korpri;
- 18) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- 19) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 20) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;
- 21) Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi;
- 22) Rumah Sakit Jiwa Tampan.

e. Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Riau pada tahun 2015 berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berjumlah 8.057 orang. Dari jumlah tersebut berdasarkan Golongan Kepangkatan sebagaimana terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah PNS Provinsi Riau berdasarkan Golongan Tahun 2017

NO	U R A I A N	JUMLAH
1.	Golongan I	66
2.	Golongan II	1.750
3.	Golongan III	5.223
4.	Golongan IV	1.081
JUMLAH		8.057

Sumber : BKD Provinsi Riau, Tahun 2017

Sementara itu, Dalam Pemerintahan Provinsi Riau terdapat jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah PNS Provinsi Riau berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2017

NO	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah
1.	Eselon I	0
2.	Eselon II	61
3.	Eselon III	307
4.	Eselon IV	817
5.	Fungsional	1.022
Jumlah Pegawai		2.207

Sumber : BKD Provinsi Riau, 2017

Dalam Pemerintahan daerah, total jumlah PNS daerah adalah 8.057 orang serta 16 orang PNS pusat yang ditugaskan di Provinsi Riau. Sedangkan jumlah PNS pensiun adalah 200 orang.

Tabel 4.3 Data Jumlah PNS Pemerintahan Tahun 2017

No.	Jabatan	Jumlah	Satuan
1	PNS		
	PNS Pusat	16	Orang
	PNS Daerah	8.057	Orang
2	PNS Pensiun	200	Orang

Sumber : BKD Provinsi Riau, 2017

f. Arah dan Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Provinsi tidak akan terlepas dari arah dan kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan menetapkan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Adapun arah dan kebijakan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan dan stabilisasi kondisi penyelenggaraan pemerintah;
2. Merekatkan kesatuan dan persatuan masyarakat serta pemerintah di Provinsi Riau;
3. Melanjutkan upaya penyelamatan dan pemulihan kelompok masyarakat yang masih termarginal dalam proses pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat;
4. Pengentasan kemiskinan terhadap kelompok masyarakat yang berada diperdesaan maupun diperkotaan, dengan menumbuh kembangkan ekonomi daerah;
5. Memacu jalannya penyelenggaraan tata pemerintahan yang konsisten dan berjalan di atas aturan-aturan hukum yang kuat dan

kelas demi terwujudnya supremasi hukum, menumbuhkan nilai-nilai keteladanan dalam menjalankan dan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

6. Mendorong berkembangnya kreatifitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di pedesaan melalui pembangunan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa.
7. Melaksanakan sepenuhnya kewenangan- kewenangan yang diberikan sesuai dengan prinsip - prinsip penyelenggaraan otonomi daerah nyata luas, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
8. Memprioritaskan penanganan permasalahan yang mendasar, serta isu strategis daerah, terutama yang menyangkut masalah kemiskinan, mengejar ketertinggalan sumber daya manusia (kebodohan) serta keterbatasan infrastruktur;
9. Memprioritaskan keseimbangan pembangunan dan pelayanan masyarakat antar wilayah daerah, kota dan desa secara proporsional dan berkeadilan;
10. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan kerja sama regional antar provinsi, serta kerjasama antar bangsa.

4.2 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

4.2.1 Sejarah Pembentukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi.

Urusan Komunikasi dan Informatika adalah urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Unit Pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau

berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

4.2.2 Visi dan Misi

Visi Dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau 2014 – 2019, sebagai berikut :

a. Visi

"Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang handal dan berdaya saing"

b. Misi

Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a. Memperluas Jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Pemerintah Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan.
- b. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.

4.2.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau

Diskominfotik mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan otonomi Daerah berdasarkan kewenangan Provinsi di Bidang Komunikasi dan

Informatika serta tugas manajerial dan teknis lingkup Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik .
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
4. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4.2.4. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Tersedianya jaringan komunikasi dan informatika hingga keperdesaan.
2. Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien.
3. Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat Riau untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Tersedianya akses informasi publik kepada masyarakat.

b. Sasaran

1. Meningkatnya jumlah jaringan komunikasi dan informatika sampai ke Pedesaan.
2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan public.
3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM ASN dan masyarakat dalam pemanfaatan TI.
4. Meningkatnya penyediaan dan penyebar luasan data/informasi yang transparan dan akuntabel.

4.2.5 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 04 Tahun 2016, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :
- a. Seksi Layanan Informasi Publik;
 - b. Seksi Penyiaran;
 - c. Seksi Media Informasi.
4. Bidang Komunikasi , terdiri dari :
- a. Seksi Komunikasi Sosial;
 - b. Seksi Kemitraan Media Komunikasi;
 - c. Seksi Komunikasi Pemerintah.
5. Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi, terdiri dari :
- a. Seksi Pengumpulan Data;
 - b. Seksi Pengolahan dan Analisa Data;
 - c. Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Evaluasi E-Government.
6. Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informatika.;
 - b. Seksi Pengembangan SDM Teknologi Informatika;
 - c. Seksi Jaringan Komunikasi.
7. Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
- a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi;
 - c. Seksi Pengawasan Pos dan Telekomunikasi.
8. UPT Media Center, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi.

9. UPT Komisi Informasi Provinsi Riau,
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Administrasi Sengketa;
 - c. Seksi Pelayanan Konsultasi & Kerjasama Badan Publik Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2.6 Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana SKPD lainnya di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau, kondisi saat ini Sumber Daya Aparatur yang ada juga masih minim, baik itu dari kuantitas maupun kualitas. Adapun jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau yang ada saat ini adalah, sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Keseluruhan

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Keseluruhan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala UPT Media Center	2
5	Kepala Sub Bagian	3
6	Kepala Seksi	12
7	Staf	39
8	PTT	56
	JUMLAH	119

Sumber : Subbag.Kepegawaian Diskominfo Provinsi Riau tahun 2018.

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 2	15
2	Strata 1	30
3	Diploma 3	4
4	Diploma 1	-
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	14
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	-
7	Sekolah Dasar	-
	JUMLAH	63

Sumber : Website Simpeg Diskominfotik tahun 2018.

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Tabel 4.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IV	13
2	Golongan III	42
3	Golongan II	8
4	Golongan I	-
	JUMLAH	63

Sumber : Subbag.Kepegawaian Diskominfotik Provinsi Riau tahun 2018

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	8
3	Eselon IV	20
4	Fungsional	-
	JUMLAH	29

Sumber : Subbag.Kepegawaian Diskominfotik Provinsi Riau tahun 2018

4.2.7 Capaian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Riau

1. Jaringan Komunikasi Data di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau:
 - a. Wireless = 28 SKPD(2009-2013) direncanakan Tahun 2014 : 5 SKPD
 - b. FO = 10 SKPD
2. Pelayanan hosting riau.go.id (43 SKPD Pemprov Riau), pembuatan e-mail Kepala SKPD Pemprov Riau, penyimpanan data secara online (drive.riau.go.id);
3. Penyediaan Ruang server, Pembuatan aplikasi (e-office, aplikasi SDDKD(sddkd.riau.go)), PNS BOX (firewall);
4. Penyebarluasan informasi melalui :
 - a. Media online : Website yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau [http:// www.riau.go.id](http://www.riau.go.id), [http:// diskominfo.riau.go.id](http://diskominfo.riau.go.id), [http:// mediacenter.riau.go.id](http://mediacenter.riau.go.id),<http://komisiinformasi.riau.go.id>, TV Streaming, Radio Streaming;
 - b. Media elektronik lokal (TVRI, RTV dan RRI) sebanyak 44 kali
5. Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Informasi Nasional Tahun 2010;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui :
 - a. Pelatihan TIK bagi masyarakat (guru, siswa) dan aparatur Pemerintah Provinsi Riau /Kabupaten/Kota se Provinsi Riau (1.986 orang);
 - b. Pelatihan bidang komunikasi dan informasi (752 orang);
 - c. Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial dan Pemerintah
7. Penyediaan Newsroom Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau dengan dukungan kontributor sebanyak 18 orang untuk menghimpun berita Provinsi Riau dan 12 Kab/Kota dan diupload di website yang dikelola Diskominfo dan PDE serta portal berita Info Publik Kementerian Kominfo RI;

8. Diseminasi Informasi tentang Internet Sehat dan Aman, Cerdas, Kreatif dan Produktif (INSAN CAKAP), Pemilih Pemula dan masalah Narkoba bagi siswa SLTA di 6 Kabupaten/Kota;
9. Prestasi / Penghargaan yang diraih :
 - a. Media Center terbaik Peringkat II Tingkat Nasional Tahun 2013;
 - b. Badan Publik Peringkat X Tahun 2013 dalam Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Peringkat I Keterisian Data SDDKN (<http://sddkn.setneg.go.id>) Tahun 2013 (20,21 %);
 - d. Harapan I Pertunjukan Media Tradisional Tingkat Nasional;
 - e. Juara I Sutradara terbaik Pertunjukan Tradisional Tingkat Nasional
10. Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tahun 2010;
11. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Riau Tahun 2011;
12. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau Tahun 2012;
13. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terlayani jaringan komunikasi data sebanyak 38 SKPD ;
14. Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan 5 aplikasi;
15. Pembuatan e-mail riau.go.id pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
16. Penyimpanan data secara online (drive.riau.go.id);
17. Persentase pengaduan perselisihan masalah informasi publik dapat terselesaikan 100 % tahun 2013 Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau 2014 - 2019 32;
18. Pelayanan publik Pemerintah Provinsi Riau memperoleh peringkat X se Indonesia sebagai badan publik dalam keterbukaan informasi publik (tahun 2013);

19. Penyediaan Bilik Media Center Di Perpustakaan Suman Hs (Tahun 2010), Di Lantai I Dinas Kominfo Dan Pde Provinsi Riau (Tahun 2012);
20. Penyelenggara Pekan Informasi Nasional Tahun 2010;
21. Pelayanan MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) sebanyak 50 unit tersebar di seluruh Kabupaten / Kota;
22. Pengembangan sdm (guru dan masyarakat) pemanfaatan tik sebanyak 1.080 orang (tahun 2012-2013);
23. Dialog publik di radio dan tv 44 kali (2009 – 2013);
24. Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Provinsi Riau sebanyak 51 jaringan pada tahun 2015;
25. Jumlah SKPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal sebanyak 11 SKPD pada tahun 2015;
26. Jumlah SKPD yang di lingkungan Pemprov Riau dengan nilai keterbukaan informasi publik >50 sebanyak 3 SKPD (tahun 2015);
27. Jumlah pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau sebanyak 429.271 pengunjung (tahun 2015);
28. Jumlah peserta bidang komunikasi dan informatika yang bersertifikat sebanyak 63 orang (tahun 2015).

4.2.8 Tantangan dan Peluang Dinas Kominfotik Provinsi Riau

a. Tantangan

- 1) Persaingan Global;
- 2) SKPD yang menangani komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama;
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
- 4) Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan;

- 5) Kurangnya komitmen Pimpinan SKPD Provinsi Riau dan SKPD Kabupaten/Kota terhadap integrasi data, pertukaran data dan keterisian data;
- 6) Content digital yang kurang mendidik, sesat dan atau merusak moral dan tatanan sosial masyarakat;
- 7) Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;
- 8) Tingginya sengketa informasi yang terjadi;
- 9) Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
- 10) Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI;
- 11) Masih banyaknya penyelenggara Pos dan Telekomunikasi serta pengguna alat/ perangkat pos dan telekomunikasi yang tidak memiliki izin;
- 12) Keterbatasan anggaran.

b. Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi;
- 2) Keinginan masyarakat memperoleh informasi;
- 3) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kemendagri, Kemkominfo dan Kemsnes RI);

- 4) Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);
- 5) Tingginya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi;
- 6) Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
- 7) Peran strategis Komisi Informasi dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik;
- 8) Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif;
- 9) Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara